



## PJ Sekda: Akan Cross Check

### ■ Tunggakan Pajak Kendaraan

**KAPUAS HULU, TRIBUN** - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah merilis kalau Kabupaten Kapuas Hulu terbesar kedua menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2019, setelah Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Kapuas Hulu jumlah kendaraan dinas yang menunggak atau belum dibayar pajak tahun 2019 sebanyak 821 unit kendaraan.

Menyikapi hal tersebut, Tribun Pontianak berusaha mengkonfirmasi ke pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, melalui Pj Sekda Kapuas Hulu, HJ Linda Purnama via WhatsApp, Kamis (27/2) pukul 16.19 WIB.

"Untuk masalah kendaraan dinas

belum bayar PKB, saya akan cross check dulu," ujarnya dengan singkat menjawab pertanyaan Tribun via WhatsApp, Jumat (28/2) pukul 08.12 WIB.

Untuk saat ini dirinya Pj Sekda Kapuas Hulu belum bisa ditemukan karena yang bersangkutan masih diluar Kota Putussibau. "Mohon maaf saya masih di luar kota," ungkapnya.

Berita sebelumnya, tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Barat tahun 2019 mencapai kurang lebih sekitar Rp 920 miliar. Dari nominal tunggakan yang ada, tunggakan kendaraan pelat merah atau kendaraan pemerintahan mencapai kurang lebih sekitar Rp 20 miliar.

Tunggakan pajak kendaraan pelat

merah ini bukan hanya milik instansi pemerintah daerah, namun instansi vertikal juga menjadi penyumbang penunggak pajak.

Tercatat instansi vertikal provinsi maupun kabupaten kota sebanyak 1.135 unit kendaraan pelat merah menunggak pajak. Sedangkan instansi yang ada di provinsi dan kabupaten kota tercatat, 7.648 unit kendaraan menunggak pajak.

Total kendaraan pelat merah menunggak pajak di Kalbar tercatat 8.782 unit. Sementara kabupaten paling banyak menunggak pajak adalah Ketapang dengan 954 unit kendaraan dan disusul oleh Kapuas Hulu, 821 unit. Kemudian Sintang, 789 kendaraan pelat merahnya menunggak pajak. (rul)